

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

165 Ijazah Ditahan Sekolah dengan Tunggakan Rp 18 Juta

Gambir, Warta Kota

Legislator DKI Jakarta meminta pemerintah daerah agar turun tangan menangani ijazah pelajar yang ditahan pihak sekolah karena menunggak sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Pengawas pemerintah daerah itu menyebut, mayoritas ijazah pelajar yang ditahan sekolah dari keluarga pra sejahtera.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, kasus ini hanya terjadi di sekolah swasta, karena di sekolah negeri para pelajar mengenyam pendidikan secara gratis.

Meski demikian, kata dia, pemerintah harus turun tangan menyelesaikan masalah itu karena ijazah dibutuhkan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi atau modal mencari kerja.

"Saya bukan selebritis hanya anggota DPRD, ada 165 ijazah yang diadukan kepada saya, nilainya hampir Rp 18 juta," ujar Jhonny pada Rabu (4/10/2023).

Jhonny menduga, masih banyak ijazah pelajar yang ditahan di sekolah jika pemerintah menelusuri kasus itu lebih dalam. Banyaknya orangtua yang tak mampu menebus ijazah karena ketiadaan duit akibat dihantam pandemi Covid-19.

"Nah ada di sekolah swasta penjual nasi uduk, sopir, ojol (ojek online), apalagi yang kemarin banyak yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja) karena Covid-19. Mereka nggak mampu membayar uang sekolah, uang pembangunan, uang ini, lalu ditahan

ijazah, adil nggak tuh?," kata Jhonny.

Menurut dia, pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada para pelajar yang ada di sekolah swasta. Dengan begitu, mereka tak perlu khawatir ijazahnya ditahan sekolah karena mendapat kepastian dari pemerintah daerah yang memberikan dana subsidi.

Politisi PDI Perjuangan ini lalu membandingkan dengan pelajar dari keluarga yang sejahtera justru mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Mereka tidak khawatir ijazahnya ditahan karena menunggak iuran, karena sekolah di sana diberikan secara gratis oleh pemerintah daerah.

"Coba perbandingan sekarang yang masuk SMAN 8 lalu SMAN 13 atau SMAN lainnya, kan banyak anak-anak orang kaya. Waktu anak saya di SMAN 13, sekolah gratis, kenapa gratis? Berarti kan diberikan subsidi, masak orang mampu disubsidi," jelasnya.

"Sementara anak penjual nasi uduk, anak ojol atau pegawai-pegawai rendahkan apalagi yang mereka kemarin di-PHK karena Covid-19 masa negara nggak ikut di sini (turun tangan)," lanjutnya.

Berdasarkan data yang dia punya, kasus ini terjadi di sejumlah sekolah swasta yang ada di lima kota Jakarta. Di Jakarta Utara misalnya, kata dia, terjadi di SMA swasta Tanjung Priok, Lagoa dan Koja.

"Ini terjadi di seluruh DKI, dan itu (sekolah swasta di Jakarta Utara) kebetulan Dapil saya," pungkasnya. (faf)